

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang rawan akan munculnya berbagai konflik. Mulai dari konflik antar suku, hingga antar Negara dengan berbagai kepentingan didalamnya. Pengembangan nuklir Iran menjadi kontroversi dan memunculkan konflik dengan negara Barat terlebih Israel yang hingga saat ini masih belum terselesaikan. Konflik ini berkembang menjadi konflik regional yang telah banyak melibatkan organisasi dan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah khususnya di kawasan Teluk Persia. Menurut sejarah, Iran dan Israel pernah menjalani hubungan persahabatan dan kerjasama di berbagai bidang. Tepatnya sejak awal berdirinya Israel pada tahun 1948, Israel banyak mengalami tantangan dan perselisihan terkait keamanan dengan berbagai negara di Timur Tengah. Israel menghadapi berbagai wilayah besar yang mana sebagian menganggap Israel sebagai musuh yang disatukan oleh solidaritas agama yang sama yaitu Islam (ARI HEISTEIN, 2021). Negara-negara tersebut yaitu Arab yang didukung banyak Negara di Timur Tengah yang mayoritas muslim.

Dilain sisi, Israel mencoba untuk menemukan celah diantara musuh-musuh potensialnya tersebut. Disinilah Israel mulai membentuk strategi awal dengan menggunakan upaya “doktrin pinggiran” yang merupakan ide dari perdana Menteri pertama David Ben Gurion guna menjalin aliansi dengan negara-negara non-Arab (yang sebagian besar merupakan Negara muslim) di Timur Tengah sebagai penyeimbang terhadap negara-negara Arab (Efron, 2018). Negara tersebut yaitu Turki dan Iran pra revolusi, yang saat itu dipimpin oleh Shah Reza Pahlevi dan beberapa negara yang saat itu memiliki orientasi yang sama terhadap Barat untuk menyerukan bahwa mereka tengah merasa terisolasi di Timur Tengah (Kajian et al., 2017).

Hubungan bilateral yang terjalin antara Iran-Israel merupakan hubungan resmi, dimana Iran bahkan menerima dua duta besar berturut-turut dari Teheran, dan melakukan hubungan kerjasama perdagangan minyak yang kuat disaat Arab memboikot Israel (Weisser, 2016). Disini Israel menggunakan logika sederhana: Musuh-musuh saya bisa menjadi teman, sehingga Iran-Israel tengah menjadi musuh yang sama bagi Arab. Selain itu, hanya Iran yang bersedia menjual minyak nya ke Israel di saat semua Negara Timur Tengah tidak mau menjualnya ke Israel karena isu Palestina-Israel. Iran sebagai importer utama barang dan jasa Israel. Tidak hanya proyek pertanian, perumahan, medis dan infrastrukturnya, tapi juga pelatihan yang diberikan badan intelejen Israel kepada polisi rahasia Shah yang terkenal kejam, Savak.

Hubungan baik ini terjalin sebelum ulama syiah berkuasa dan kekuasaan penuh berada di tangan Pemimpinan Shah Reza Pahlevi (1941-1979), dimana Iran yang merupakan Negara muslim kedua ini mengakui Israel pada 1950, setahun setelah Turki. Teheran dan Tel Aviv dihubungkan oleh kemitraan informal berdasarkan kerja sama yang erat dibidang militer, teknologi, pertanian bahkan perminyakan. Seiring berjalannya waktu, Shah mulai memperoleh kekuasaan lebih lanjut sehingga mulai memperluas hubungannya dengan Amerika Serikat ditambah dengan hubungan dekatnya dengan Israel terkait pendapatan minyak Iran menjadikan Shah mulai merancang pembangunan nuklir di tahun 1953. Keinginan tersebut mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat dibuktikan dengan terbentuknya kesepakatan kerjasama antara Iran dengan Amerika Serikat dibawah program *Atoms For Peace*. Dalam program tersebut, Iran mengirimkan sejumlah pelajarnya ke Amerika Serikat untuk mempelajari teknologi nuklir. Kemudian di tahun 1975 Iran dibawah kepemimpinan Shah Reza Pahlevi dan Amerika Serikat resmi menandatangani kerjasama dalam pengadaan nuklir sipil.

Pasca lengsernya Shah Reza Pahlevi di tahun 1978 setelah Revolusi Islam Iran dibawah Ayatullah Ruhullah Khomeini, hubungan bilateral Iran-Israel, Iran-AS dan

beberapa negara barat berubah. Lengsernya kepemimpinan Shah Reza Pahlevi ini menyebabkan terhentinya proses pembangunan reaktor di Busher-1 telah mencapai 90% yang mana 60% dari seluruh peralatan telah selesai dipasang sedangkan untuk reaktor di Busher-2 baru mencapai 50% (Tide Aji Pratama, 2018). Seluruh pembangunan reaktor nuklir milik Iran terpaksa diberhentikan. Selain terhentinya kerjasama dalam pembangunan nuklir di Iran, program pelatihan yang diberikan oleh *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) turut diberhentikan. Keputusan tersebut ditentukan secara sepihak oleh Ayyatullah Ruhullah Khomeini selaku pemimpin agung Iran sebagai wujud kemarahannya terhadap imperealisme yang diterapkan negara- negara barat terhadap Iran.

Namun ternyata Iran dan Israel kembali melakukan komunikasi pada pertengahan 1980-an ketika terjadinya perang Iran-Irak (1980-1988). Terlepas dari retorika anti AS dan anti-Israel Iran, hal ini bermula saat pemerintah Ronald Reagan secara diam-diam mengizinkan penjualan senjata di Iran melalui Israel dalam rangka membantu mendanai Contras sayap kanan di Nikaragua yang secara bersamaan merundingkan pembebasan beberapa sandera AS yang ditahan di Lebanon oleh pro-Milisi Iran. Selanjutnya di tahun 1989, media AS mengungkapkan bahwa Israel telah membeli minyak Irak senilai \$36 juta dalam kesepakatan unruk membebaskan tiga tentara Israelyang ditahan di Lebanon.

Dibalik kepentingan Israel yang memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Iran, Israel tidak ingin Iran terus mengembangkan energi nuklirnya sehingga dapat menguasai wilayah teluk Persia dengan nuklirnya. Israel merupakan negara yang memiliki senjata nuklir, namun tidak turut serta melakukan penandatanganan Perjanjian Nonproliferasi (NPT) 1968, sehingga menjadikan Israel tidak tunduk terhadap inspeksi berbeda dengan Iran yang bersedia menandatangani kesepakatan NPT serta tunduk terhadap inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) (Trita Parsi, 2007). Disinilah Israel mulai mencurigai Iran terus menerus dalam hal membangun senjata nuklir pemusnah masal yang membahayakan. Berlanjut pada

tahun 1994, ketegangan perselisihan keduanya semakin meningkat ketika Israel menuduh Hizbullah, yang didukung oleh Iran atas pemboman sebuah pusat Yahudi di ibukota Argentina, Buenos Aires yang menewaskan 85 orang (Trita Parsi, 2007).

Perselisihan ini berlangsung hingga tahun 2005 akibat semakin dinamisnya isu geo-politik di kawasan Timur Tengah, yang menjadi pemicu utama dan potensial hubunganrivalitas antara Iran-Israel. Momentum terpilihnya Ahmadinejad sebagai presiden pada tahun 2005 menjadi awal mula kisah rivalitas yang baru dalam sejarah. Mulai dari proxy war yang terjadi antara Israel dan Lebanon yang dijalankan oleh Iran, *proxy war* Israel-Iran hingga isu pengembangan nuklir yang semakin meningkatkan ketegangan rivalitas dengan Israel. Akibat keterikatan Iran dalam pemasokan dana strategi bahkan alutsista kepada Hizbullah memunculkan isu negative terkait tujuan perkembangan nuklir Iran. Bahkan meskipun Iran telah mengatakan bahwa program nuklir demi kepentingan damai, tetap saja para pemimpin Israel terutama Benjamin Netanyahu menganggap bahwa Iran sedang mengembangkan program nuklirnya demi menciptakan senjata nuklir pemusnah massal. Bagi Israel, pengembangan nuklir yang dilakukan Iran ini sangat membahayakan negara nya dan juga negara-negara lain di kawasan Timur Tengah (Penelitian et al., 2021).

Pernyataan Netanhayu ini ternyata didukung penuh oleh Amerika Serikat salah satunya dengan memberikan boikot ekonomi bahkan AS meminta negara-negara barat untuk turut memberikan sanksi kepada Iran. Ditambah pendirian pangkalan militer di perbatasan Iran oleh Amerika seolah meyakinkan dunia internasional bahwa Iran tengah mengembangkan senjata nuklir. Iran dibawah kepemimpinan Ahmadinejad melakukan strategi perlawanan dengan mengemukakan data yang mengindikasikan bahwa sebenarnya Israel juga memiliki senjata nuklir. Kondisi hubungan Iran dan Israel di bawah kepemimpinan Ahmadinejad dan Netanhayu digambarkan sebagai hubungan rivalitas dengan kondisi tensi yang tinggi, namun konflik senjata secara langsung belum pernah terjadi (Weisser, 2016).

Bahkan hubungan rivalitas ini tetap berlangsung di masa kepemimpinan Iran selanjutnya, Hassan Rouhani. Jika dimasa kepemimpinan Ahmadinejad yang merupakan seorang konservatif cenderung keras dalam melawan Israel, Hassan Rouhani yang merupakan figure moderat lebih memilih strategi deference yang berbeda (Holliday, 2020). Terlebih dalam pengembangan nuklir Iran, Hassan Raohani lebih bersikap terbuka dalam melakukan perundingan dengan negara Barat. Hassan Rouhani juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Iran sebagai bagian dari dunia internasional siap melakukan perubahan dan dapat bekerjasama. Sikap Hassan Rouhani terhadap pemerintahan Israel hanya sebatas rivalitas ungkapan dan dalam keadaan *status quo*, tanpa melibatkan perang bersenjata.

Hal ini dibuktikan dalam ungkapan Rouhani dalam pidato konferensi dimana ia emberikan perhatian yang cukup besar terkait arti penting demokrasi dalam dunia Islam dengan salah satu ungkapannya “*islam is the religion of democracy and peace and not the religion of war*” selain itu Hassan Rouhani juga manggambarkan Israel sebagai rezim Zionis sebagai penghancur stabilitas dan keamanan di timur tengah “*destroying the stability and security of the Middle East*”(Holliday, 2020). Ini menunjukkan bahwa Iran tetap menjalani hubungan rivalitas dengan Israel, terlebih dalam isu pengembangan nuklir. Hampir sekitar 43 tahun, Iran menjalin hubungan rivalitas dengan Israel sekaligus menjadi perhatian dan ancaman negara-negara Barat di Timur Tengah sejak runtuhnya rezim Shah Reza Phalevi yang ditandai dengan peristiwa revolusi Iran di tahun 1979.

Israel merupakan kekuatan dominan dalam pembuatan kebijakan di kawassan Timur Tengah terlebih posisinya sebagai negara baru. Israel selalu merasa terancam terlebih terhadap Iran setelah renggangnya hubungan keduanya di era kepemimpinan Ali Khameni dan menjadikan Iran sebagai musuh utamanya. Hal ini dikarenakan Iran merupakan salah satu negara berpengaruh di Timur Tengah yang memiliki kemajuan di bidang ekonomi, terutama pada sektor minyak. Dikatakan bahwa GDP Iran hamper sama dengan negara bagian Florida, yangmana 85 persen didapatkan dari ekspor

minyak dan pengeluaran tahunan pertahanan Iran yang mencapai US\$ 18 miliar hingga US\$ 22 miliar yakni sebesar 4 hingga 5 persen dikeluarkan dari GDP Iran (Rome, 2020). Kekuatan militer Iran ini menjadi perhitungan tersendiri bagi negara- negara di Timur Tengah, terutama Israel.

Kekhawatiran Israel inilah yang dimanfaatkan oleh Hassan Rouhani dalam mengembangkan strategi nuklir Iran sebagai upaya deterrence terhadap Israel. Strategi Hassan Rouhani dengan terus mengembangkan energi nuklir melalui keputusan untuk terus mengembangkan teknologi nuklir Iran didukung oleh peningkatan pangayaan uranium mencapai kemurnian tanpa batas berdasarkan kebutuhan teknis yang diwacanakan Iran sebagai bentuk penolakan terhadap sikap Amerika Serikat. Selain melalui pengembangan nuklir, Hassan Rouhani juga memanfaatkan kekuatan dominansi Iran di wilayah Timur Tengah dengan cara membangun jaringan aliansi dengan kekuatan sektarian lokal di kawasan Timur Tengah, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali proyek Persia-Iran di Timur Tengah. Iran juga lebih berfokus terhadap bagaimana upaya untuk memperdalam pengaruh politiknya melalui agen- agennya di Irak, Suriah, Lebanon dan Yaman serta memperjelas kehadirannya terhadap isu konflik di wilayah Palestina dan sebagai ajang menciptakan kekuatan pendukung Iran dalam menghadapi Israel dan Amerika.

1.2 Rumus Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan pertanyaan berupa :

Bagaimana Strategi Pengembangan Nuklir Iran di Era Hassan Rouhani sebagai Upaya Deterrence terhadap Israel ?

1.3 Kerangka Pemikiran/ Landasan teori

Untuk menjelaskan strategi pengembangan nuklir Iran sebagai upaya deterrence terhadap Iran di masa kepemimpinan Hassan Rouhani, Penulis mencoba menerapkan

berbagai konsep maupun teori Ilmu Hubungan Internasional. Penulisan kerangka berfikir ini diharapkan dapat menjadikan skripsi semakin terarah dan terkonsep dengan jelas. Adapun teori yang digunakan yaitu Teori Realisme yang mencakup keamanan nasional (Hans J. Morgenthau) dan Konsep Pencegahan (Extended Deterrence).

Teori Realisme (Keamanan Nasional)

Menurut Morgenthau, paradigma Realisme merupakan pendekatan untuk menyadari dan memahami aspek-aspek yang menentukan hubungan politik antar bangsa, serta menjelaskan cara dari aspek-aspek tersebut untuk saling berhubungan satu sama lain dalam menjalankan politik internasional. Dalam penjelasannya, inti dari perspektif realisme sendiri mencakup tiga hal utama: pandangan dan tindakan realis, berpusat pada kepentingan nasional (nasional interest), kekuasaan (power), balance of power dan pengaturan kekuasaan dunia tanpa ada yang dominan (anarki).

Keamanan nasional menurut Richard Ashley sebagai tokoh kritikus pascastrukturalis, merupakan gagasan dimana dalam hubungan internasional sesuatu itu merupakan masalah politik darurat/masalah keamanan yang muncul bukan karena adanya ancaman objektif bagi negara, seperti misalnya, neorealisme yang menginginkannya, melainkan sesuatu menjadi masalah ketika aktor sekuritisasi yang kuat (seringkali, tetapi tidak harus negara) berpendapat bahwa sesuatu ini merupakan ancaman eksistensi terhadap beberapa objek yang perlu ditangani segera jika objek tersebut ingin bertahan (Floyd, 2011).

Keamanan dapat diartikan sebagai situasi dimana tidak dalam ancaman, bahaya dan ketakutan yang serius. Suatu bangsa dapat dinyatakan dalam keadaan aman ketika negara dapat memprediksi kekacauan yang akan dihadapi dan mengatasinya dengan kebijakan-kebijakan yang ada tanpa mengorbankan nilai-nilai yang ada (core values), dengan menghindari terjadinya perang bahkan jika terpaksa, negara dapat menjamin kemenangan dalam peperangan tersebut (Holmes, 2015). Keamanan nasional perlu diidentifikasi oleh masing-masing negara dengan cara menetapkan kriteria yang jelas

terkait apa saja yang menjadi peluang ancaman bagi keamanan di negara tersebut. Cakupan perlindungan keamanan nasional harus mencakup warga negara (individu dan masyarakat), kesinambungan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan kedaulatan serta keutuhan wilayah (Sinaga, 2009).

Kemanan negara berkaitan dengan banyak aspek seperti ekonomi, politik, militer dan sosial budaya (Sinaga, 2009). Buzan menjelaskan keamanan sendiri diklarifikasikan menjadi lima dimensi, yaitu (Stone, 2009):

1. Dimensi Militer, dimana kemanan tidak hanya mengacu pada pembangunan militer baik konvensional maupun nuklir, namun terkait pengembangan kemampuan personil militer dan doktrin-doktrin kemiliteran.
2. Dimensi Politik, dimana keamanan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk penjagaan dan pertahanan kesinambungan proses politik, ideologi dan sistem pemerintahan.
3. Dimensi ekonomi, dimana kemanan merujuk pada upaya-upaya dalam melindungi sumber-sumber ekonomi dan kesejahteraan yang dimiliki negara.
4. Dimensi social budaya, merupakan keamanan yang mengacu pada kemampuan negara untuk melindungi nilai-nilai budaya bangsa.

Negara dengan sejarah perang akan lebih agresif mengenai masalah keamanan nasionalnya. Negara dengan sejarah perang tersebut selalu menempatkan dirinya dalam keadaan waspada. Sebagai bentuk penjagaan agar negara tetap bertahan dalam berhubungan dengan dunia internasional, keamanan nasional perlu diperkuat melalui pengutusan strategi militer. Strategi didefinisikan sebagai cara mencapai tujuan dengan kekuatan yang ada dalam lingkungan tersebut dengan menerapkan dalam kekuatan militer untuk tujuan perang militer.

Dalam mencapai konsep deterrence ini, Hassan Rouhani memutuskan untuk memilih menyelesaikan konflik melalui pendekatan yang cenderung terbuka dalam melakukan perundingan dengan negara-negara internasional demi kelangsungan pengembangan

nuklir Iran. Selain itu tokoh Hassan Rouhani yang cenderung moderat lebih memfokuskan untuk memperluas jaringan terhadap berbagai negara dan memperlihatkan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan, seperti keputusannya untuk bergabung dalam kesepakatan nuklir 2015 dengan berbagai negara barat demi kelangsungan kesepakatan pengembangan nuklir sesuai kebutuhan dengan syarat dihilangkannya sanksi ekonomi. Sebaliknya, akan memutuskan untuk keluar dan memberontak saat kesepakatan tersebut dirasa merugikan bagi Iran, dan memilih untuk memperkuat aliansi dengan negara-negara di Timur Tengah. Hassan Rouhani juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Iran sebagai bagian dari dunia internasional siap melakukan perubahan dan dapat bekerjasama.

Konsep Pencegahan (Deterrence Theory)

Deterrence dalam studi keamanan internasional mengacu pada upaya strategis dalam mencegah pihak lain untuk mengambil tindakan yang merugikan dengan memberikan gambaran berupa serangan balik apabila tindakan tersebut dilakukan (Morgan, 1977). Konsep Deterrence sendiri mengacu pada tindakan sebagai upaya preventif agar sasaran diplomasi tidak melakukan tindakan merugikan, dan apabila sasaran tetap melakukan tindakan yang disepakati. Maka balasan akan dijatuhkan sesuai dengan ancaman yang telah diberikan.

Konsep Deterrence ini juga digambarkan dalam 3 aktivitas :

1. Membujuk sebagai upaya menghentikan niat penyerangan
2. Mengambil tindakan, seperti melakukan penarikan dari lokasi sengketa
3. Perubahan kebijakan melalui perubahan pemerintah

Menurut (Spiegel, 2004) (Holliday, 2020) terdapat 3 persyaratan yang harus dipenuhi suatu negara untuk menerapkan proses deterrence ini :

1. Komitmen

Syarat ini dijadikan sebagai langkah awal suatu negara untuk memiliki komitmen “menghukum” negara lain jika hendak melakukan serangan kepada negara

yang bersangkutan. Artinya, negara yang tengah berada di posisi bertahan itu harus lebih tegas menekan garis batasannya dan terus memberi peringatan kepada negara yang menentangnya akan konsekuensi yang didapat apabila menentang keputusan tersebut. Dalam menekan komitmen negara juga dibutuhkan langkah definitive dan spesifik. Hal ini juga berkaitan dengan fungsi *deterrence* yang akan gagal apabila suatu negara tidak tegas dalam memiliki komitmen yang kuat untuk “menghukum” negara yang melanggar dan melakukan serangan.

2. Kapabilitas

Langkah kedua yaitu kapabilitas, karena komitmen juga tidak akan berhasil apabila negara tidak memiliki alat yang mendukung dalam melakukan upaya *deterrence* tersebut. Karena fungsi *deterrence* sendiri yaitu meyakinkan negara lain bahwa melakukan pelanggaran seperti menyerang negara yang dalam posisi bertahan maka negara pembuat komitmen harus memiliki kekuatan berupa kapabilitas yang kuat untuk menyerang balik negara pelanggar. Bahkan jika tingkat *deterrence* terlihat lemah, negara harus terlihat kuat dan meyakinkan musuh bahwa kelemahan tersebut bukan kekuatan sesungguhnya.

3. Kredibilitas

Syarat terakhir yaitu kredibilitas suatu negara dalam melakukan *deterrence*. Kredibilitas negara ini juga berkaitan dengan masa lalu negara yang bersangkutan dan merupakan gambaran umum terkait negara yang membantu agar upaya *deterrence* ini berhasil diterapkan. Kredibilitas akan membantu negara dalam melaksanakan komitmen dan membangun kapabilitas agar semakin meyakinkan negara lawan untuk tidak melakukan agresi apapun kepada negara dalam posisi bertahan. Dengan kredibilitas tersebut, negara lain akan berfikir dua kali untuk melakukan serangan terhadap negara bersangkutan, maka disinilah *deterrence* akan berjalan baik.

Secara umum, pengertian *deterrence* adalah bagaimana cara membuat musuh takut untuk menyerang. Alat-alat yang menunjukkan kapabilitas militer biasanya digunakan

sebagai upaya untuk membuat negara lain takut untuk melakukan serangan kepada negara dengan kapabilitas yang lebih kuat. Namun jika suatu negara belum cukup untuk memiliki kapabilitas tersebut dapat melakukan *deterrence* nya melalui pangkalannuklir nya (*nuclear deterrence*).

Menurut Bernard Brodie, *nuclear deterrence*, merupakan keadaan dimana suatu negara yang awalnya ingin melancarkan serangan pre-emptive kepada negara lain, takut akan ancaman retaliasi (tindakan mengenai pelaksanaan kepatuhan terhadap putusan) dari negara tersebut yang pada akhirnya menyebabkan sang aggressor enggan untuk melancarkan senjata. Keenganan tersebut menghasilkan stabilitas dan status quo sehingga ketiadaan perang dapat terjamin.

Untuk mencapai konsep *deterrence* ini, Iran mulai mencapai ketiga konsep tersebut. Aplikasi yang dilakukan Iran dalam mencapai komitmen dilakukan dengan terus memberikan yang terbaik untuk kepentingan nasional Iran seperti saat Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Trump memutuskan untuk keluar dari perjanjian nuklir 2015 dan memberikan Iran sanksi berupa embargo, sehingga Iran memutuskan untuk melanggar perjanjian nuklir 2015 dengan kembali menjalankan program peningkatan produksi uranium yang diperkaya, sebagai balasan diterapkannya kembali sanksi Amerika Serikat dan sebagai bentuk gertakan terhadap negara-negara barat agar berhenti melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk memenuhi proses kapabilitas, Iran semakin memperkuat kapasitas nuklirnya sebagai upaya *deterrence* untuk mencapai kekuatan nuklir yang mampu menggertak musuh terutama Israel agar tidak melakukan serangan diluar agresi yang ditentukan. Sedangkan dalam proses kredibilitas, Iran memilih strategi dengan mempererat jaringan aliansi melalui kekuatan lokal di kawasan Timur Tengah, dengan tujuan menghidupkan kembali proyek Persia-Iran di Timur Tengah.

Konsep *deterrence* ini penulis terapkan sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi tindakan strategi Iran dalam merespon terror dan serangan-serangan Israel dibawah

Amerika Serikat. Dengan mengidentifikasi strategi terkait pengembangan nuklir yang dilakukan Iran dapat dijelaskan secara empiris dan rasional berdasarkan konsep *deterrence* ini.

1.4 Hipotesis

Iran mengembangkan senjata nuklir sebagai upaya *deterrence* terhadap Israel berkaitan dengan strategi pengembangan nuklir Iran di era Hassan Rouhani sebagai upaya *deterrence* terhadap Israel melalui:

1. Iran di zaman kepemimpinan Hassan Rouhani menetapkan persyaratan yang kuat terhadap kesepakatan nuklir 2015 sebagai upaya untuk memprediksi dan mengatasi potensi kekacauan yang mengancam kemanan dan kesejahteraan Iran .
2. Program nuklir ini dikembangkan secara maksimum oleh Iran dan semakin dikembangkan secara progresif oleh Hassan Raohani, berupa pembangunan berbagai reaktor baru di berbagai wilayah di Tehran, pengayaan uranium mencapai kemurnian 60% dan meningkatkan biaya pengembangan dibidang pertahanan dan pengembangan teknologi nuklir .
3. Strategi lain Hassan Rouhani berhasil memperbaiki hubungan Iran dengan tetangganya dan berusaha menciptakan wacana-wacana potensi nuklir Iran yang ditakuti di wilayah Teluk Persia sebagai alat *deterrence* bagi Israel.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi pengembangan nuklir Iran sebagai upaya *deterrence* terhadap Israel yang merupakan lawan terbesar Iran di Timur Tengah dibawah kepemimpinan Hassan Rouhani. Melalui analisis menggunakan Teori Penangkalan (*Detterence*), penelitian ini akan menganalisis dan mengelaborasi strategi pengembangan nuklir Iran yang merupakan alutsista militer yang mampu mencegah lawan yang berniat memperlemah bahkan menghancurkan Iran. Iran menggunakan kemampuannya dalam pengembangan nuklir bahkan dibawah tekanan internasional dengan tetap berusaha mempertahankan haknya untuk tetap

mengembangkan nuklir sebagai bentuk keamanan negara dari ancaman serangan militer Israel.

1.6 Manfaat Penelitian

Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan Ilmu Hubungan Internasional yang membahas tentang Kebijakan Nuklir Iran, upaya *deterren* Iran terhadap Israel dan penelitian analitik menurut teori Realisme (keamanan nasional) dan teori Deterrence.

1.7 Jangkauan Penelitian

Dalam pembahasan kepenulisan ini penulis akan membatasi kasus yang dibahas agar tidak menyimpang terlalu jauh dan dapat memudahkan penulis selama melakukan analisis permasalahan yang ada. Pembahasan akan lebih didetailkan pada pengambilan keputusan di masa kepemimpinan Hassan Rouhani (2013-2021) dalam bentuk strategi pengembangan nuklir sebagai upaya deterrence dengan tetap mengaitkannya di masa kepemimpinan di era Ahmadinejad dimana pada saat itu setelah Iran berhasil terbebas dari kepemimpinan Pahlevi yang sewenang wenang hingga mendapat begitu banyak embargo dari negara barat tetapi kemudian Iran dapat membuktikan bahwa negaranya mampu mengatasi banyak tekanan hingga sampai kepemimpinan Ahmadinejad dan akhir kepemimpinannya tahun 2013.

1.8 Metode Penelitian

Analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dimana data yang digunakan berupa teks dan dokumen yang kemudian dilakukan analisa terhadap bahasa yang tercatum dalam sumber penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data/berbasis dokumen (dokument-based research) yakni menggunakan teknik pengumpulan data penelitian secara tidak langsung yang bersifat primer atau resmi yakni official documents yang dipublikasikan oleh negara, kelompok

bisnis maupun organisasi kepada khalayak atau publik, dan dokumen yang bersifat sekunder yang dapat diakses melalui jurnal, buku, teks, artikel, news report atau media, serta hasil penelitian terdahulu.

1.9 Sistematika Kepenulisan

Sistematika kepenulisan skripsi tersebut maka akan disusun sebagai berikut :

BAB I : Menguraikan terkait bagian dasar dalam skema kepenulisan skripsi berupa : pendahuluan yang bemuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, tujuan penelitian, hipotesa, jangkauan penelitian

BAB II : Menjelaskan lebih lanjut mengenai, sejarah perkembangan nuklir Iran Kapasitas Nuklir yang dimiliki Iran, serta alasan Iran memilih menggunakan Nuklir sebagai upaya deterrence.

BAB III : Menjelaskan bagaimana strategi Iran untuk memenangkan rivalitas terhadap Israel di wilayah Teluk Persia dikaitkan dengan pengembangan nuklir dari zaman ke zaman.

BAB IV : Mendeskripsikan strategi Iran dalam pengembangan nuklir yang akan difokuskan dimasa kepemimpinan Hassan Rouhani. Selain itu di sub bab selanjutnya akan dibahas seperti apa upaya deterrence yang dilakukan Hasan Rouhani dalam mencegah serangan militer Israel dilihat dari kebijakan militer dimasa kepemimpinan Hassan Rouhani.

BAB V : Memuat kesimpulan terkait hasil penelitian